

BAB III
ANALISIS REALISME DEMOKRATIK
TERHADAP KEBIJAKAN DEMOKRATISASI
BARACK OBAMA DI LIBYA

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai dinamika hubungan dan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Libya sebelum, selama dan sesudah revolusi. Hubungan kedua negara yang mulai melakukan normalisasi sejak tahun 2003 kemudian kembali menjadi renggang ketika gelombang *Arab Spring* melanda Libya. Gerakan revolusioner yang mendapat perlawanan dari rezim berkuasa, membuat Amerika Serikat segera merancang strategi arah kebijakan politik luar negerinya untuk membantu proses revolusi di Libya. Respon Amerika Serikat terhadap konflik revolusi di Libya begitu cepat dan kuat, berbeda respon kepada negara-negara lainnya yang juga terkena dampak dari *Arab Spring*, seperti Tunisia, Bahrain, Mesir, dan lainnya (Atkinson H. L., 2012, hal. 8).

Berbagai konsep kebijakan pun telah dilaksanakan oleh Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya di Libya seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Mulai dari kebijakan intervensi militer yang dijalankan di bawah resolusi DK PBB, hingga pemberian bantuan baik ekonomi maupun bantuan politik untuk pembangunan pemerintahan yang demokrasi. Langkah Amerika Serikat terhadap Libya yang terlihat begitu ambisius mengindikasikan bahwa terdapat suatu kepentingan di balik upaya Amerika Serikat dalam mendemokratisasikan Libya. Maka penelitian ini dirasa paling cocok dianalisis menggunakan pendekatan Realisme Demokratik.

Penjelasan lebih lanjut mengenai analisis Realisme Demokratik dalam kebijakan demokratisasi Amerika Serikat di Libya akan di bahas pada bab ini, yang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan terkait pandangan Realisme Demokratik. Bagian kedua bab ini akan menjelaskan mengenai analisis perwujudan Realisme Demokratik yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam kebijakannya di Libya, serta melihat kepentingan Amerika Serikat di balik keterlibatannya dalam intervensi dan proses reformasi di Libya.

3.1. PANDANGAN REALISME DEMOKRATIK

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam skripsi ini akan menggunakan pendekatan Realisme Demokratik. Pendekatan ini merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Krauthammer bagi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, karena Krauthammer melihat bahwa empat pendekatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat sebelumnya tidak cocok lagi diterapkan pada kondisi dunia saat ini. Pertama, Isolasionisme yang menjelaskan tentang pembatasan diri dari keterlibatan internasional yaitu menghindari hubungan yang sifatnya permanen dengan negara-negara lain dan sebisa mungkin memiliki koneksi politik yang sekecil-kecilnya. Pendekatan ini sudah kuno dan tidak lagi bekerja pada dunia saat ini yang telah terhubung dengan teknologi dan ekonomi. Ketakutan dan membatasi diri akan perdagangan, imigran bukan lagi strategi untuk melindungi kepentingan dan kekuatan nasional Amerika Serikat (Krauthammer, 2004, hal. 3-4).

Kedua, Internasionalisme Liberal, yaitu yang menginginkan negara-negara dunia merujuk dan terikat pada aturan dan nilai-nilai internasional, serta tidak boleh menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas. Ini menjadikan negara-negara kecil atau lebih lemah menghimpun kekuatan dengan mengikat negara-negara kuat sehingga dapat menahan kekuatan negara-negara yang lebih besar, seperti Amerika Serikat. Ketiga, Realisme, yang percaya bahwa dengan kekuatan unipolar atau uniteralisme adalah alat untuk mencapai kepentingan dan tujuannya di tengah dunia yang anarki. Menurut Krauthammer, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat harus lebih dari sekedar kekuatan untuk mempertahankan dan memperluas kepentingan nasional. Tetapi juga harus, mengonsepskan kebijakan luar negeri yang dapat mewujudkan kepentingan nasional dan di saat yang sama, dengan nilai-nilai demokrasi menciptakan perdamaian dan kebebasan (Krauthammer, 2004, hal. 4-13).

Keempat adalah Globalisme Demokratik, yaitu yang mengutamakan kepentingan nasional dan kekuasaan yang harus berdasarkan kebebasan dan HAM serta memahami bahwa penyebaran demokrasi sangat penting dilakukan sebagai penghubung kerjasama antar negara. Namun pendekatan ini dirasa menjadi sesuatu yang sangat universal, terlalu idealis, dan terlalu ambisius. Visi Amerika Serikat untuk menyebarkan dan menerapkan global demokrasi terlalu utopis dan tanpa akhir atau hasil yang pasti. Oleh karena itu, Realisme Demokratik dinilai dapat menjadi sebuah preferensi dari Realisme dan Global Demokrasi untuk mencapai kepentingan strategis (Krauthammer, 2004, hal. 13-16).

Krauthammer berpendapat bahwa strategi politik luar negeri Amerika Serikat harus lebih *offensive* bukan *defensive*. Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar dunia. Menurut Krauthammer, Realisme Demokratik merupakan pendekatan yang bertarget, terfokus, dan terbatas. Ia mendefinisikan Realisme Demokratik ini dalam sebuah ungkapan yang dikemukakan dalam tulisannya pada tahun 2004, yaitu:

“We will support democracy everywhere, but we will commit blood and treasure only in places where there is a strategic necessity-meaning, places central to the larger war against the existential enemy, the enemy that poses a global mortal threat to freedom.”
(Krauthammer, 2004, hal. 16)

Berdasarkan dari penggalan pernyataan Krauthammer di atas, artinya bahwa dalam Realisme Demokratik, intervensi tidak harus dilakukan selamanya di mana kebebasan demokrasi itu terancam. Namun, dilakukan hanya pada wilayah di mana yang bisa memberikan dampak yang efektif, signifikan bagi *national interest* Amerika Serikat. Terdapat empat poin penting yang menjadi indikator dalam pendekatan Realisme Demokratik ini. Pertama, pendekatan ini merupakan pendekatan kebijakan luar negeri yang harus mampu memanfaatkan peluang dan melihat prospek keberhasilan ketika akan melakukan intervensi. Di mana, intervensi hanya dilakukan di daerah yang memiliki peluang dan prospek demokrasinya besar.

Kedua, kepentingan nasional merupakan prioritas. Sehingga tidak akan ikut campur di semua tempat dan di setiap situasi. Tetapi hanya, di wilayah yang berpotensi sebagai ancaman bagi keberlangsungan kepentingan nasional, dan kawasan yang memiliki nilai strategis. Krauthammer menyebutnya dengan *“where it counts”*. Selanjutnya, poin ketiga dan terakhir

adalah penggunaan kekuatan militer dan agenda promosi demokrasi (Krauthammer, 2004, hal. 16-19).

Menurut Krauthammer, Realisme Demokratik ini merupakan penggabungan penggunaan kekuatan militer dan penyebaran demokrasi secara bersamaan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kekuatan suatu negara dapat digunakan secara maksimal, untuk mengurangi dan membatasi ruang gerak musuh eksistensial yang menjadi penghambat dalam pencapaian kepentingan nasional. Sementara penyebaran demokrasi dan nilai-nilai kebebasan menjadi instrumen untuk menghasilkan perubahan yang dapat memajukan kepentingan nasional (Krauthammer, 2004, hal. 17-21).

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa pandangan Krauthammer mengenai Realisme Demokratik sebagai pendekatan yang tepat bagi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat ini belum sempurna. Sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan ini. Salah satu kritik terhadap pandangan Krauthammer ini adalah dari Francis Fukuyama.

Fukuyama menuliskan respon terhadap pandangan Krauthammer tersebut melalui sebuah majalah *The National Interest* dengan judul “*The Neoconservative Moment*” dan “*America at the Crossroad: Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy*”. Fukuyama menyampaikan bahwa pendapat yang disampaikan Krauthammer tidak sesuai dengan realita. Beberapa hal dalam tulisan Krauthammer dirasa masih ambigu. Pertama adalah maksud dari kata “*strategic necessity*” dalam tulisannya bisa mengandung makna yang lebih luas atau bahkan sempit. Makna kata tersebut

bisa saja mengacu pada kebutuhan strategis untuk melawan musuh yang menimbulkan ancaman global terhadap kebebasan atau justru merujuk pada kepentingan nasional Amerika Serikat sendiri (Fukuyama, 2004).

Kedua adalah makna dari “*existential enemy*”, perlu diperjelas apakah musuh eksistensial yang dimaksud adalah ketika mereka merupakan ancaman terhadap eksistensi Amerika Serikat sebagai bangsa atau sebagai rezim demokratis? Pendapat Krauthammer yang menganggap bahwa radikalisme Islam merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat adalah salah. Mereka justru merupakan ancaman bagi rezim di Timur Tengah. Pandangan Krauthammer mengenai pendekatan kebijakan Realisme Demokratik merupakan pemikiran sempit, yang mana menganggap bahwa kekuatan nilai-nilai Amerika Serikat sebagai hegemon dan polisi dunia dapat memberikan wewenang untuk bertindak dan melakukan intervensi ke seluruh dunia (Fukuyama, 2004).

Menurut Fukuyama, penggunaan kekuatan Amerika Serikat harus dilakukan dengan tujuan moral. Kepentingan nasional memang penting tetapi bukan dengan langsung ikut campur dengan urusan internal negara lain layaknya seorang tamu yang tidak diundang. Bentuk unilateralisme dan intervensi langsung dengan kekuatan militer bukan pilihan yang tepat. Kekuatan dan kekuasaan Amerika Serikat bukan digunakan melalui kekuatan militer. Tetapi harus lebih kepada, membangun pengaruh untuk membentuk lembaga-lembaga internasional yang akan memberikan legitimasi multilateral. Bagi Fukuyama, legitimasi internasional sangat penting bagi

penerapan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat (Fukuyama, 2006, hal. 226).

Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pandangan Krauthammer seperti pendapat Fukuyama yang telah dipaparkan di atas, namun pendekatan Realisme Demokratik ini dipandang masih cukup relevan digunakan untuk menganalisis kasus pada skripsi ini. Implementasi pendekatan Realisme Demokratik dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini, sebenarnya telah diterapkan dalam beberapa kebijakan, seperti dalam kasus Afghanistan dan kasus invasi Irak atau dikenal dengan operasi “*Iraqi Freedom*” meskipun hasilnya juga tidak luput dari kritik. Terkait pendekatan Realisme Demokratik ketika diterapkan dalam kasus revolusi Libya akan dijelaskan dalam sub bab selanjutnya.

3.2. REALISME DEMOKRATIK DALAM KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI LIBYA

Salah satu hal yang sangat penting untuk menciptakan keberlangsungan kepentingan Amerika Serikat adalah dengan menciptakan kondisi yang mana masyarakat merasa bebas, tidak tertekan dengan rezim otoriter. Penggunaan kekuatan secara maksimal dan bijaksana, yaitu dengan membatasi penggunaan kekuatan hanya di mana itu penting dan perlu digunakan, menjadi strategi Amerika Serikat yang ditunjukkan dalam intervensinya di Libya. Menjaga kekuatan Amerika Serikat dan penegakkan demokrasi untuk menciptakan stabilitas politik, adalah prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya (Office of the Press Secretary, The White House, 2011, hal. 5-6).

Strategi kebijakan Amerika Serikat di Libya ini merupakan bentuk dari implementasi pendekatan kebijakan politik luar negeri Realisme Demokratik. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut terkait Realisme Demokratik dalam kebijakan Amerika Serikat di Libya dengan melihat empat indikator dalam kebijakan ini, yaitu peluang, kepentingan nasional, penggunaan kekuatan militer dan penegakan demokrasi.

1.2.1. *Arab Spring* Sebagai Peluang

Pada dasarnya di awal masa jabatan pemerintahan Barack Obama, Libya tidak menjadi fokus utama dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Justru saat itu lebih difokuskan pada Pakistan dan Afghanistan untuk memberantas terorisme (Obama, 2009). Timur Tengah memang menjadi kawasan yang penting untuk Amerika Serikat, tetapi tidak pada Libya secara spesifik. Barulah kemudian setelah pergerakan gelombang *Arab Spring* memasuki Libya, Amerika Serikat kemudian menjadikan Libya sebagai sasaran penting dari kebijakan luar negerinya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Obama, 2011).

Dalam sebuah pidatonya di Departemen luar negeri, Obama memuji gelombang perubahan politik yang terjadi wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, dan berjanji bahwa akan menjadi kebijakan Amerika Serikat untuk mempromosikan reformasi di seluruh wilayah dan untuk mendukung transisi menuju demokrasi (Dunne, 2014). Akan tetapi pada faktanya, Amerika Serikat hanya fokus pada negara tertentu saja, salah satunya Libya. Ini menunjukkan bahwa kepentingan Realisme Demokratik Amerika Serikat terhadap Libya dimulai ketika

Arab Spring karena melihat ada peluang besar untuk melakukan revolusi demokratis di Libya. Terlihat jelas Libya menjadi sasaran wilayah yang penting bagi Amerika Serikat dibandingkan dengan negara lain.

Ada suatu urgensi yang menjadi tujuan Amerika Serikat di Libya. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa awal dari keterlibatan Amerika Serikat di Libya adalah karena adanya pelanggaran kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu ada campur tangan untuk menyelamatkan warga Libya dari kekejaman pemimpinnya sendiri. Dikeluarkannya resolusi PBB 1970 dan 1973 yang memberikan mandat kepada Amerika Serikat, Inggris dan Prancis untuk menyelamatkan warga sipil dari kekejaman rezim Qadhafi menjadi media bagi keterlibatan Amerika Serikat di Libya. Namun sebenarnya, masalah kemanusiaan yang terjadi di Libya bukanlah permasalahan yang menjadi fokus utama dalam kebijakan intervensi Amerika Serikat ke Libya. Justru pelanggaran kemanusiaan yang terjadi menjadi pembenaran bagi Amerika Serikat untuk melakukan intervensi (Dunne, 2014).

Kegagalan Liga Arab untuk mengatasi pemberontakan demokratis di Libya semakin menambah besar peluang yang menguntungkan bagi Amerika Serikat untuk memainkan peran mereka sebagai polisi dunia (Muoneke, 2015, hal. 6). Peluang tersebut kemudian yang menjadi jalan masuk untuk menggulingkan kekuasaan Qadhafi yang dianggap menghalangi kepentingan Amerika Serikat di Libya. Tindakan

pemerintah Libya dianggap menjadi ancaman signifikan bagi perdamaian, keamanan regional dan kepentingan nasional Amerika Serikat (Muoneke, 2015, hal. 6).

Meskipun secara tidak spesifik menyebutkan Libya namun dalam pidato Obama pada bulan Mei 2011 menegaskan, bahwa gelombang revolusi *Arab Spring* menjadi sebuah kesempatan besar. Obama menyatakan pergolakan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat, untuk mendukung upaya negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menuju perubahan demokratis (Obama, 2011). Keputusan Obama untuk campur tangan di Libya bertujuan untuk menjaga transisi revolusioner yang terjadi di Libya dan negara-negara tetangga (Tardelli, 2011, hal. 21-22).

1.2.2. Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Pada kasus Amerika Serikat dan Libya, dapat dilihat bahwa kebijakan Amerika Serikat di Libya pada tahun 2011 didasari tidak hanya karena terjadi konflik kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Selalu ada landasan strategis yang menjadi penguat Amerika Serikat dalam melakukan intervensi. Intervensi dilakukan tidak hanya sekedar menyelamatkan warga sipil. Tetapi berkembang lebih luas untuk menggulingkan kekuasaan Qadhafi dan menegakkan demokrasi karena ada suatu kepentingan di dalamnya yang ingin diraih. Dalam sebuah pidato di International Conference tentang Libya di London pada tanggal 29 Maret 2011, Hillary Clinton menyatakan:

“..while our military mission is focused on saving lives, we must continue to pursue the broader goal of a Libya that belongs not to a dictator, but to the Libyan people. Now, we cannot and must not attempt to impose our will on the people of Libya, but we can and must stand with them as they determine their own destiny. And we have to speak with one voice in support of a transition that leads to that time..” (Clinton, 2011).

Penyataan di atas secara tidak langsung telah mengisyaratkan bahwa bentuk kebijakan Amerika Serikat akan mengarah ke tujuan dan kepentingan lebih besar, yaitu perubahan rezim. Bahkan Obama dalam pertemuan pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa intervensi di Libya adalah sebuah kesempatan besar untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan kepentingan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa kebijakan Amerika Serikat di Libya merujuk pada tujuan Amerika Serikat yang lebih besar pada demokrasi dan hak asasi manusia yang tidak hanya di Libya tetapi mencakup di kawasan (Rogin, 2011).

Strategi arah kebijakan Amerika Serikat terhadap Libya pun berbeda dengan kebijakannya kepada negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara lainnya yang juga terkena gelombang *Arab Spring*. Amerika Serikat hanya melakukan intervensi di Libya (Atkinson H. L., 2012, hal. 8-10). Hal ini dikarenakan pemerintahan Qadhafi yang berkuasa selama 42 tahun dianggap sangat berbahaya bagi keamanan dan pencapaian kepentingan Amerika Serikat (Dimitrova, 2011). Dalam Realisme Demokratik dikatakan bahwa negara akan ikut campur di wilayah di mana memiliki nilai strategis, hal ini sangat terlihat dalam kebijakan Amerika Serikat di Libya. Amerika Serikat

melakukan intervensi di Libya karena kepentingan nasional mereka sedang dipertaruhkan di sana.

Pertama ketidakstabilan yang terjadi di Libya akan mengancam kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat tidak hanya di Libya, tetapi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara karena ketidakstabilan tersebut bisa menjadi lebih luas (Muoneke, 2015, hal. 3). Kedua adanya dominasi Tiongkok, perkembangan ekonomi Tiongkok mendorong untuk mengembangkan akses investasinya ke dalam sumber energi di negara-negara Afrika termasuk Libya sebagai negara yang kaya dengan sumber energi. Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi Amerika Serikat sehingga dibutuhkan strategi kebijakan yang tepat untuk membendung pengaruh Tiongkok dan membatasi aksesnya ke sumber daya energi. Oleh karena itu Amerika Serikat perlu ikut campur dan mengambil andil dalam proses revolusi di Libya untuk memastikan bahwa kepentingan nasionalnya dapat tercapai.

Ketiga, terkait kebijakan luar negeri Qadhafi yang berambisi dalam menyatukan negara-negara Arab untuk menciptakan Pan-Arab. Pada tahun 1972, Qadhafi berhasil membentuk sebuah "*Federation Of Arab Republic*", yaitu sebuah bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang militer antara Libya, Mesir, Sudan dan Syria untuk menyerang Israel. Meskipun federasi ini tidak bertahan lama karena keluarnya Mesir ketika di bawah pemerintahan Anwar Saddat yang lebih memihak kepada Amerika Serikat. Tetapi, Qadhafi

terus memperjuangkan penyatuan Arab. Di bawah kepemimpinan Qadhafi, Libya sangat mengecam Israel dan mendukung penuh untuk Kemerdekaan Palestina. Libya menjadi negara penyokong kuat perjuangan rakyat Palestina, yaitu dengan mendukung *Palestine Liberation Oerorganization* untuk membebaskan rakyat Palestina dari pendudukan Israel (D.H., Agung, 2011, hal. 31-33).

Tindakan Qadhafi tersebut tentunya menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, karena seperti yang kita ketahui bahwa Israel adalah sekutu Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Qadhafi yang sangat memegang teguh gagasan nasionalisme Arab dan gencar mempromosikan anti-kolonialisme serta sangat menentang Barat, menjadi momok yang berbaya bagi keberlangsungan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Qadhafi tidak hanya berpengaruh dalam peraturan politik di negara-negara Arab tetapi juga dalam politik Internasional (Museveni, 2011). Alasan-alasan ini menjadi landasan intervensi Amerika Serikat di Libya, yang awalnya untuk menyelamatkan warga sipil kemudian diperluas untuk menjatuhkan pemerintahan Qadhafi karena Qadhafi dianggap menjadi risiko bagi kepentingan regional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

Keputusan intervensi tersebut mengungkapkan bahwa Libya adalah wilayah yang memiliki nilai strategis bagi arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Buktinya, Amerika Serikat hanya

melakukan intervensi di Libya tidak kepada Mesir, Tunisia, Bahrain, Suriah, dan lainnya yang juga merupakan rezim otoriter dan terdapat pula pelanggaran-pelanggaran HAM di sana. Bahkan di sisi lain Amerika Serikat justru mendukung rezim-rezim otoriter, seperti Arab Saudi, Yaman, Oman, Guinea Ekuatorial, dan Turkmenistan. Hal ini terlihat bahwa ketika rezim otoriter tidak menghalangi dan pro terhadap Barat serta sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan tetap mendukung rezim tersebut dan tidak mau mendorong adanya reformasi demokrasi (Muoneke, 2015, hal. 112-113).

Oleh karena itu pemerintah Amerika Serikat tidak menargetkan seluruh negara-negara yang memiliki rezim otoriter. Tetapi hanya di negara-negara yang rezim otoriternya membahayakan dan mengancam kepentingan Amerika Serikat, seperti Libya. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memilih untuk tidak bertindak di Mesir, Tunisia, Bahrain, maupun Yaman, memperkuat bukti, bahwa Amerika Serikat secara tidak langsung telah memperlihatkan ada suatu tujuan yang ingin dicapai untuk kepentingan nasionalnya di Libya. Mengingat sepanjang peristiwa *Arab Spring*, Libya menjadi satu-satunya negara yang mendapatkan intervensi militer dari negara-negara asing termasuk Amerika Serikat (Aronoff, 2011).

Menurut pendapat Allin dan Jones bahwa dalam melakukan intervensi pada suatu negara, tidak mungkin tanpa ada tujuan implisit yang ingin dicapai (Maessen, 2012, hal. 21). Libya yang terletak pada

wilayah strategis dengan cadangan minyak dan gas alam melimpah membuat daya tarik tersendiri bagi negara-negara kuat, seperti Amerika Serikat untuk mengejar pengaruh politik dan ekonomi yang lebih besar. Amerika Serikat selalu memiliki minat yang signifikan terhadap negara-negara di mana memiliki sumber energi. Menunjukkan bahwa ketahanan, keamanan dan stabilitas energi merupakan elemen sentral yang menjadi suatu prioritas dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Muoneke, 2015, hal. 57).

Sementara itu menurut Forte, ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai Amerika Serikat melalui reformasi politik, ekonomi dan keamanan. Pertama, meningkatkan akses perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk beroperasi di Libya. Kedua, mencegah akses minyak untuk China dan Rusia. Ketiga, untuk memperluas wilayah geostrategi Amerika Serikat dalam akses sumber daya. Keempat, menstabilkan wilayah regional dengan mempromosikan demokrasi dan membatasi ruang gerak musuh yang mengancam (Forte, 2012, hal. 9-11). Inilah yang menjadi alasan mengapa Libya menjadi target penting bagi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Melihat sikap Amerika Serikat dalam kebijakan dan keterlibatannya selama proses revolusi Libya, maka Realisme Demokratik masuk pada analisis bahwa Amerika Serikat dalam mendemokratisasikan Libya adalah sebagai sarana dalam mencapai kepentingannya. Menurut Realisme Demokratik, dalam mewujudkan kepentingan nasional adalah dengan menyebarkan kebebasan dan

membelenggu musuh yang mengancam kepentingan nasional (Krauthammer, 2004, hal. 16). Artinya bahwa tidak semua tempat akan menjadi tujuan penyebaran demokrasi, tetapi hanya di wilayah yang dianggap penting dan kepentingan nasionalnya terancam.

1.2.3. Penggunaan Kekuatan Militer

Dalam usahanya untuk mendemokratisasikan Libya, pemerintahan Obama melangkah sangat hati-hati dan terukur. Amerika Serikat tidak ingin terlihat secara langsung menjadi negara yang mendominasi melakukan intervensi (Jr, E.J. Dionne, 2011). Oleh karena itu, Obama memutuskan hanya melakukan tindakan terbatas dalam aksi di Libya dan berperan di balik layar. Amerika tidak menurunkan pasukan angkatan darat dan segera menyerahkan tanggung jawab operasi militer melalui NATO. Hal ini dilakukan agar Amerika Serikat tidak terlihat begitu ambisius dalam mengejar kepentingannya dan untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara Timur Tengah terhadap Amerika Serikat (Atkinson H. L., 2012, hal. 6-7).

Amerika Serikat mungkin tidak terlihat memainkan peran utama secara langsung dalam operasi di Libya, tetapi itu menunjukkan bahwa bentuk intervensi militer Amerika Serikat yang lebih terbatas dan multilateral adalah strategi antara Intervensionisme Liberal dan bentuk kehati-hatian Realisme dalam penggunaan kekuatan untuk mencapai kepentingannya (Tardelli, 2011, hal. 23). Di awal operasi, Amerika Serikat memanfaatkan kemampuan militernya untuk

menghentikan tindakan ofensif rezim Qadhafi, dan menurunkan sistem pertahanan udara sebelum seluruh komando diserahkan kepada NATO sepenuhnya. Aset-aset militer dan peralatan tempur Amerika Serikat menjadi sumber kekuatan besar dalam menekan sistem pertahanan udara Libya. Amerika Serikat juga bertindak sebagai pendukung primer dari operasi-operasi gabungan (Witter A. B., 2011, hal. 9).

Obama telah memetakan strategi yang sesuai dengan pendekatan Realisme Demokratik, yaitu mengandalkan *hard power* Amerika Serikat untuk melemahkan rezim otoriter yang berkuasa dan agenda penegakan demokrasi sebagai senjata untuk mencapai kepentingannya. Agenda intervensi kemanusiaan di balik resolusi 1970 dan 1973 dijadikan sebagai sebuah propaganda justifikasi untuk campur tangan di Libya. Dimana intervensi militer ini adalah untuk mendukung kelompok oposisi melawan pemerintahan berkuasa yang pada akhirnya bertujuan untuk mendorong adanya perubahan rezim (DoS, DoD, 2011).

Dukungan Amerika Serikat dalam operasi NATO di Libya yang berakhir pada perubahan rezim bertujuan untuk memasang rezim yang dapat diandalkan dalam memenuhi kepentingan Amerika Serikat (Mukhtar Imam, 2014, hal. 1154). Kebijakan militer melalui *Operation Odyssey Dawn* dan *Operation Unified Protection* merupakan sebuah strategi yang dirancang oleh Amerika Serikat untuk kemajuan demokrasi serta kebebasan sipil dan politik di Libya.

1.2.4. Penegakkan Demokrasi

Agenda untuk membawa Libya menjadi lebih demokratis, digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk merasionalisasi dukungannya mempersenjatai pemberontak Libya dalam menggulingkan pemerintah pimpinan Qadhafi (Muoneke, 2015, hal. 6). Amerika Serikat memainkan perannya dengan memberikan bantuan keuangan, pelatihan pasukan militer, dan pasokan senjata kepada pejuang pemberontakan yang kontra terhadap Qadhafi. Bahkan Presiden Obama dilaporkan telah menandatangani perintah rahasia, yang bertujuan untuk mempersenjatai pejuang pemberontak melalui operasi rahasia (Hosenball, 2011).

Pada tanggal 1 Maret 2011 Hillary Clinton sebagai Menteri luar negeri Amerika Serikat saat itu menyatakan kepada kongres, bahwa intervensi di Libya merupakan operasi yang memiliki spekulasi tinggi. Sehingga Amerika Serikat harus secara maksimal menggunakan seluruh aset yang dimilikinya baik melalui diplomasi, pembangunan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi (DoS, DoD, 2011, hal. 5). Amerika Serikat kemudian menggandeng NTC untuk merumuskan rancangan transisi demokrasi Libya (Randall, 2011). Melalui agenda transisi demokrasi yang dilakukan tersebut, dimaksudkan ketika Amerika Serikat berhasil membawa Libya menganut nilai-nilai Barat, yaitu yang menjunjung kebebasan, HAM dan ekonomi liberal. Maka akan semakin mudah

bagi Amerika Serikat mengontrol Libya untuk memperlancar kepentingan nasionalnya.

Hillary Clinton menegaskan bahwa perubahan menuju demokrasi adalah untuk kepentingan nasional Amerika Serikat (DoS, DoD, 2011, hal. 22). Ini memperkuat Realisme Demokratik dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Di mana dalam intervensi di Libya Amerika Serikat menggunakan pendekatan Realisme dan Liberalisme untuk mendukung perubahan revolusioner sehingga kepentingannya dapat terwujud. Melalui perubahan revolusioner yang dijalankan Amerika Serikat tersebut, merupakan upaya untuk dapat mengendalikan Libya, atau setidaknya menjadikan Libya sebagai satelit mereka.

Motivasi untuk mendemokratisasi Libya bukan karena tanpa alasan atau hanya sekedar moralitas dan bentuk tanggungjawab belaka. Namun karena jika Libya tidak didemokratisasi maka akan mengancam dan menghambat pencapaian kepentingan Amerika Serikat di wilayah itu. Sesuai dengan prinsip Realisme Demokratik yang mana demokratisasi dilakukan jika itu akan memfasilitasi kepentingan Amerika Serikat. Penggulingan rezim Qadhafi dari kekuasaannya dan mengatur ulang rezim yang lebih luwes dan sesuai dengan arah Amerika Serikat menjadi tujuan sebenarnya dari intervensi di Libya. Kebijakan Amerika Serikat untuk tidak ikut campur di negara-negara lain dan hanya memilih Libya menjadi bukti bahwa tanggung jawab untuk melindungi warga sipil bukanlah tujuan utama sebenarnya.

Terdapat motif tersembunyi yang menjadi tujuan Amerika Serikat. Sehingga setelah berhasil menggulingkan Qadhafi dari kursi pemerintahan, peranan Amerika Serikat di Libya masih terus berlanjut. Dukungan dan bantuan berupa senjata, militer, dan finansial kepada pihak oposisi NTC merupakan strategi untuk mengontrol dan memengaruhi agar dapat mempermudah akses ke gas alam dan minyak mentah Libya. Amerika Serikat kemudian membentuk Libya dengan demokrasi multi-partai, membangun lembaga-lembaga gaya barat dan menganut sistem ekonomi kapitalis untuk mempromosikan ekonomi pasar bebas (Muoneke, 2015, hal. 95-96).

Melalui agenda reformasi politik yang dilakukan Amerika Serikat di Libya pasca Qadhafi, menjadikan kegiatan politik mulai terbuka dan bebas membuat tumbuhnya partai-partai politik yang mempromosikan ideologi kapitalisme barat. Bantuan transisi pemerintahan, seperti pemilihan umum, pelatihan kepemimpinan, dan pembentukan tata pemerintahan yang representatif bertujuan untuk mendukung pencapaian kepentingan Amerika Serikat (Dunne, 2014). Melalui hal tersebut Amerika Serikat secara tidak langsung telah mengontrol dan memandu Libya, untuk menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Sehingga pemerintahan yang terbentuk dapat mempermudah mencapai tujuannya, yaitu menjamin pasokan minyak dari cadangan minyak mentah.

Kemudian untuk memastikan transisi berhasil, Amerika Serikat mendukung transisi dengan segala sumber daya dan dukungan politik yang ada. Dukungan pemerintah Amerika Serikat untuk melegitimasi pemerintah pro-pemberontak selama kerusuhan Libya dimaksudkan untuk reformasi politik neo-liberal di era pasca Qadhafi. Perubahan rezim, pembentukan pemerintahan yang baru merupakan tujuan strategi dari kebijakan Amerika Serikat untuk membangun kembali hubungan baik dengan Libya yang selaras dengan kepentingan kebijakan Amerika Serikat. Oleh karena itu, promosi demokrasi menjadi tujuan penting bagi Amerika Serikat di Libya (Muoneke, 2015, hal. 48-49).

Monopoli penggunaan kekuatan yang dilakukan melalui kebijakannya berupaya untuk mendorong reformasi liberal yang memperkuat liberalisme pasar dan melembagakan struktur politik neoliberal yang dapat memenuhi kepentingannya. Sebenarnya demokratisasi bukanlah faktor utama dalam keberadaan Amerika Serikat di Libya, melainkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk menguasai sumber-sumber kekayaan di Libya yang lebih mendominasi. Retorika kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dengan demokrasi, hanya merupakan salah satu dari sekian banyak alasan yang digunakan untuk mencapai tujuan (Stanley C. Igwe, 2017, hal. 7-9).

Sementara itu, reformasi ekonomi bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi Libya yang terpusat menjadi sistem ekonomi terbuka dengan melembagakan etos pasar bebas. Melalui privatisasi industri minyak dengan cara menjamin dominasi modal asing dan mendestabilisasi *National Oil Corporation* (NOC) berhasil membuat Libya lebih banyak mengekspor kekayaannya minyaknya ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan energi dan pasokan minyak sehingga Amerika Serikat tetap bisa memasok sumber daya energi untuk kebutuhan industri kapitalisnya. Reformasi yang direncanakan dari sektor minyak di Libya juga dapat dilihat sebagai agenda kapitalis barat, yang mana ditujukan untuk memberikan perusahaan minyak Amerika Serikat akses tanpa hambatan ke cadangan minyak Libya (Chossudovsky, 2013).

Selain itu, reformasi ekonomi tersebut dapat kita lihat sebagai cara Amerika Serikat dalam memperkuat akumulasi modal mereka. Ini dianggap sebagai kepentingan besar pemerintah Amerika Serikat dalam hubungan kedua negara dengan pemerintah baru yang terpilih secara demokratis di Libya. Program transisi yang didukung pemerintah Amerika Serikat di Libya, merupakan upaya untuk mengubah negara Libya menjadi masyarakat kapitalis. Sementara itu program reformasi pemerintah baru, bertujuan untuk mengkonsolidasikan struktur kapitalis liberalisme di era pasca revolusi. Melalui reformasi ekonomi dan politik yang kuat akan

membantu membangun masyarakat dengan tata kelola yang representatif dan bertanggung jawab (Charles Dunne, 2013).

Sehingga akan lebih mudah untuk menguntungkan ekonomi Amerika Serikat yang mana pembukaan pasar bebas juga akan meningkatkan untuk ekspor dari Amerika Serikat dan memacu investasi asing masuk sehingga dapat penciptaan lapangan kerja baru. Bantuan Amerika Serikat baik militer, ekonomi, dan politik tidak hanya bertujuan untuk membantu Libya keluar dari rezim otoriter dan gejolak politik serta ketidakstabilan ekonomi. Tetapi hal tersebut lebih kepada kepentingan Amerika Serikat sendiri dalam meningkatkan keamanan nasional dan pembangunan ekonomi (Summers, 2018).

Terlihat jelas bahwa mengejar kekayaan minyak dan gas alam, serta melanjutkan investasi di Libya yang sangat terbatas pada saat pemerintahan Qadhafi menjadi sangat penting bagi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Proyek demokrasi dengan reformasi ekonomi yang digagas oleh Amerika Serikat di Libya bertujuan untuk terus memperluas akses modal, pasar dan ketersediaan energy serta melembagakan dominasi modal asing dalam ekonomi domestik Libya (Muoneke, 2015, hal. 95-96). Penggunaan kekuatan dan berbagai bantuan mulai dari militer, ekonomi dan politik yang dilakukan adalah usaha untuk mendorong perubahan dalam membentuk tatanan pemerintahan dan politik Libya yang baru sesuai keinginan Amerika Serikat (CIRET-AVT, 2011, hal. 32).

Pemaparan di atas telah menggambarkan bagaimana gelombang revolusi *Arab Spring* yang masuk ke Libya menjadi sebuah kesempatan besar bagi Amerika Serikat untuk intervensi, dan bagaimana kombinasi penggunaan kekuatan militer dan penyebaran demokrasi secara bersamaan dalam keterlibatan Amerika Serikat di Libya. Strategi kebijakan Amerika Serikat melalui penggunaan kekuatan militer telah berhasil mewujudkan tujuan jangka pendek dan panjang keterlibatan Amerika Serikat di Libya, yaitu menyelamatkan warga sipil dari kekejaman Qadhafi dan menjatuhkan rezim Qadhafi (Patrick, 2011). Namun, proyek demokrasi yang digagas Amerika Serikat untuk menciptakan kestabilan dan membentuk Libya menjadi negara yang lebih baik, tidak memperlihatkan keberhasilan yang signifikan. Terbukti dengan kondisi Libya sejak pasca rezim Qadhafi sampai saat ini yang justru semakin buruk.

Pada awalnya memang Amerika berhasil untuk mendorong Libya menuju demokrasi dengan berbagai reformasi politik seperti telah melakukan pemilihan umum, pembentukan lembaga-lembaga pemerintah, dan mulai melakukan liberalisasi ekonomi. Hal tersebut merupakan pencapaian terbaik Amerika Serikat di Libya. Perkembangan tersebut adalah sebuah perubahan besar yang selama empat dekade Libya terkurung dalam rezim kediktatoran. Banyak yang mengakui keberhasilan dan memuji tindakan Amerika Serikat di Libya untuk membebaskan masyarakat Libya dari rezim Qadhafi dan membantu pembangunan negara.

Namun di sisi lain, perubahan rezim yang diusung oleh Amerika Serikat justru menjadi dilema bagi Amerika Serikat sendiri. Alih-alih menciptakan demokrasi dan memperbaiki stabilitas, kondisi Libya pasca Qadhafi semakin konflikual dengan perang sipil yang berkelanjutan (Tim Molesworth, 2015., hal. 10-11). Optimisme Amerika Serikat untuk membawa perubahan Libya menjadi lebih baik tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Bahkan presiden Barack Obama mengungkapkan penyesalan dalam operasi penggulingan Muammar Qadhafi tetapi meninggalkan negara itu dalam keadaan rapuh dan tidak stabil. Obama sendiri mengakui kegagalan Amerika Serikat di Libya. Dalam wawancara dengan Chris Wallace di BBC, Obama mengungkapkan bahwa kegagalan Amerika Serikat adalah kegagalan untuk merencanakan operasi pembangunan Libya yang matang pasca konflik (BBC, 2016).

Amerika Serikat tidak belajar dari pengalamannya di Afganistan dan Irak, Obama mengulangi kesalahan yang sama karena gagal membawa perubahan dan justru menambah kekacauan. Begitu juga halnya dengan Libya, demokrasi yang dibangun oleh Amerika tidak cukup kuat untuk membentuk Libya menjadi negara yang benar-benar menegakkan nilai-nilai demokrasi. Amerika Serikat sendiri meremehkan fakta bahwa menggulingkan pemerintahan dan menggantikan dengan yang baru tidak mudah. Membentuk demokrasi suatu negara juga tidak akan cepat dan memerlukan waktu dalam jangka panjang. Kini Libya dihadapkan dengan kondisi yang lebih parah daripada kondisi sebelum revolusi. Libya berada diambang kehancuran

bahkan dikatakan sebagai negara gagal atau “*Failed State*” (Carpenter, 2017).

Perselisihan sipil yang berkepanjangan, gejolak politik dan ekonomi yang ekstrem menyebabkan ketidakpastian masa depan Libya. Kekacauan yang terjadi malah menjadi bumerang sendiri bagi Amerika Serikat. Kelompok ekstrimisme dan islam radikal yang tumbuh semakin kuat justru menambah ancaman bagi kepentingan keamanan Amerika di Timur Tengah dan Afrika Utara. Libya hancur karena bersaing memperebutkan kekuasaan dan sumber minyak (Natalucci, 2017). Dari tahun 2013 hingga pertengahan 2014 pemerintah Libya semakin melemah, kekerasan terus berlanjut. Perebutan kekuasaan terjadi antar suku, oposisi, dan menimbulkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang kembali menimbulkan perang saudara. Gejolak gerakan radikalisme yang meningkat menambah ketidakstabilan negara tersebut (Christopher S. Chivvis, 2014, hal. 7-20).

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Libya dengan menggunakan pendekatan Realisme Demokratik justru meningkatkan intensitas konflik. Tidak hanya berpengaruh terhadap politik dan keamanan, gejolak konflik yang terjadi juga sangat memengaruhi ekonomi khususnya dalam produksi minyak. Kehancuran fasilitas produksi minyak yang rusak akibat perang yang berkelanjutan telah menghambat laju produksi minyak Libya bahkan terpaksa tutup, yang mana tentunya akan berdampak pada transaksi ekspor minyak Libya (Mohsin Khan, 2013, hal. 4-5).

Selain itu, kondisi ini juga dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi Libya pasca perang yang tidak berjalan lancar, proses politik yang macet dan kurangnya keamanan akibat banyaknya perang. Akhirnya keadaan Libya yang lemah dan gejolak politik dan ekonomi yang rentan, memberikan peluang bagi milisi untuk merebut kendali beberapa fasilitas produksi minyak (Tim Molesworth, 2015., hal. 44). Kondisi-kondisi ini tentunya secara tidak langsung juga menjadi penghambat bagi kepentingan Amerika Serikat dalam mengembangkan akses minyak dan membuka investasi di Libya.

Di bawah alasan *humanitarianisme*, agenda demokratisasi Amerika Serikat di Libya merupakan upaya untuk mengubah sistem politik dan ekonomi Libya, dari kediktatoran menuju demokrasi ala Barat sebagai jalan masuk dalam meraih kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Namun faktanya, bukan demokrasi yang justru terjadi tetapi malah mengeskalasi konflik. Ini tentunya menjadikan pekerjaan rumah baru bagi Amerika Serikat. Sekali lagi, Amerika gagal dalam menerapkan Realisme Demokratik dalam politik kebijakan luar negerinya di Libya. Penerapan kebijakan Amerika Serikat di Libya merupakan pola pikir jangka pendek. Amerika Serikat dengan cepat menjatuhkan Qadhaf untuk perubahan rezim tetapi tidak melihat konsekuensi dan mempersiapkan tantangan yang akan datang.

Oleh karena itu, Amerika harus lebih hati-hati lagi dalam memperhitungkan dan menetapkan kapan dan di mana akan melakukan intervensi. Amerika Serikat harus lebih mempertimbangkan apakah intervensi benar-benar dibutuhkan atau tidak. Karena intervensi bukanlah sesuatu yang murah dan cepat. Jika intervensi kemanusiaan seperti di Libya digunakan

sebagai instrument untuk mencapai kepentingan, intervensi seharusnya bukan hanya disiapkan untuk meruntuhkan rezim. Harus lebih dari itu, yaitu harus mampu melakukan rekonstruksi pasca konflik yang kuat.

Kemudian PBB sebagai lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk memberikan legitimasi dalam melakukan intervensi melalui resolusi, seharusnya lebih tegas dan profesional. PBB harus memiliki batasan-batasan yang jelas dan melalui perencanaan yang matang terlebih dahulu dalam memberikan mandat untuk intervensi. Karena pada prakteknya itu akan menjadi sangat luas. Tidak sedikit negara yang melakukan intervensi dengan dalih melaksanakan resolusi PBB, padahal untuk mengejar kepentingan nasionalnya, baik politik maupun ekonomi seperti yang dilakukan Amerika Serikat di Libya.

Intervensi yang dilakukan Amerika Serikat di Libya telah menuai berbagai kritik. Di satu sisi, intervensi Amerika Serikat dianggap gagal untuk membawa Libya menjadi negara demokratis yang lebih stabil dan justru menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan serta perang saudara, bahkan Obama sendiri mengakui kegagalan dan penyesalan Amerika Serikat dalam intervensi di Libya. Namun di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa pada dasarnya intervensi yang dilakukan Amerika Serikat berhasil, salah satunya adalah pendapat dari Shadi Hamid. Berdasarkan tujuan dari resolusi PBB yang dikeluarkan untuk menyelamatkan warga sipil dari kekejaman rezim Qadhafi, kebijakan intervensi Amerika Serikat tercapai (Hamid, 2016).

Sementara itu terkait kekacauan dan perang saudara yang terjadi di Libya, Hamid mengatakan bahwa itu bukanlah semata-mata akibat dari intervensi Amerika Serikat. Ketidakstabilan yang terjadi di Libya saat ini lebih kepada karena kegagalan komunitas internasional dalam membantu Libya membangun kembali negara mereka yang hancur. Hamid menegaskan bahwa bagaimanapun intervensi Amerika Serikat pada saat itu dibutuhkan untuk membantu masyarakat Libya melawan rezim Qadhafi, karena jika tidak maka akan sangat kecil kemungkinan masyarakat Libya bisa menggulingkan Qadhafi dan melakukan reformasi seperti negara-negara tetangga lainnya. Bahkan ketika Amerika tidak campur tangan, kondisi Libya saat ini kemungkinan akan menjadi seperti Suriah yang mana akan lebih banyak menimbulkan kekacauan (Hamid, 2016).

Bagaimana pun, pada dasarnya setiap kebijakan luar negeri yang dilakukan suatu negara pasti akan mendapatkan konsekuensinya, baik itu kerugian maupun keuntungan. Begitu juga dengan pendekatan Realisme Demokratik dalam kebijakan Amerika Serikat di Libya, yang mana kebijakan yang diterapkan Amerika Serikat tidak cukup berhasil, telah menyebabkan Amerika harus menghadapi ketidakstabilan Libya yang justru mengancam kepentingannya tidak hanya di Libya tetapi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan suatu kebijakan, tidak hanya dengan merencanakan strategi dan tujuan jangka pendek. Tetapi harus mengkonsepkan agenda dan strategi jangka panjang yang lebih matang untuk menjamin keberlangsungan kepentingan nasional, serta memikirkan konsekuensi yang akan terjadi setelah tindakan dan strategi penanganannya.